

ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA¹⁵

Dahiri¹ dan Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo²

ANALYSIS OF EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH AGAINST POVERTY IN INDONESIA

Naskah diterima 4 November 2016, direvisi 1 Desember 2016, disetujui 6 Desember 2016

Abstract

This study purpose to show the relationship between government spending and economic growth to poverty in Indonesia. With central and local government spending tends to increase every year. However, the increase can not guarantee it will decline against poverty. The spending there is related directly and indirectly to poverty. National and regional economic growth is a reflection of the relationship that indirect expenditure against poverty. The results of the study with time series data and panel data years 1984-2015 all provinces in 2013-2015, the model 1 and 2 show that the central and local government spending and the national and regional economic growth significantly affects poverty with a negative relationship.

Keywords: The poverty rate, central and local government spending, and national and regional economic growth

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia ingin hidup berkecukupan, begitu juga dengan negara Indonesia menginginkan rakyatnya bisa berkecukupan dan sejahtera, karena hal tersebut merupakan cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dimaksud yaitu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi hampir di setiap negara. Definisi kemiskinan setiap negara cenderung berbeda. Di Indonesia kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan minimum yang memadai, yang terdiri dari konsumsi makanan sebesar 2.100 kilo kalori/orang/hari dan non-makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, pakaian, dan barang lainnya/jasa. Kemiskinan merupakan tantangan bagi setiap Presiden terpilih sebagai kepala pemerintahan untuk bisa mengurangi angka kemiskinan. Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan

¹⁵ Terima kasih kepada Bapak Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D yang telah mereview naskah jurnal ini.

ini diterjemahkan dalam berbagai program-program pemerintah yang melibatkan berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa menjadi 7-8 persen pada akhir tahun 2019.

Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan membutuhkan dukungan anggaran dalam APBN dalam hal ini anggaran belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan roda penggerak bagi perekonomian baik nasional maupun regional sebagai upaya untuk kesejahteraan rakyat atau mengurangi angka kemiskinan. Belanja pemerintah ini dibagi dalam beberapa pos belanja yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Belanja ini ada yang berhubungan langsung dengan angka kemiskinan seperti beras untuk keluarga miskin, tapi ada belanja yang tidak berhubungan langsung seperti belanja modal. Belanja yang berhubungan langsung ini lebih cenderung konsumtif. Belanja yang tidak langsung berhubungan dengan angka kemiskinan lebih cenderung non konsumtif atau lebih pada belanja produktif. Belanja ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan bisa menciptakan banyak lapangan kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran. Pengangguran ini merupakan salah satu faktor dari kemiskinan.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian Seri Jefry Adil Waruwu (2016) dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014, pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 dan investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Oleh karena itu, berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi hampir di setiap negara. Namun definisi kemiskinan setiap negara cenderung berbeda. Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Pemerintah hampir setiap

tahun mempunyai program untuk bisa mengurangi angka kemiskinan. Untuk bisa melaksanakan program tersebut diperlukan dukungan anggaran. Oleh karena itu, anggaran belanja pemerintah diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan. Belanja pemerintah berguna untuk menjalankan roda perekonomian. Selanjutnya, belanja pemerintah merupakan program pemerintah untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pertumbuhan ekonomi juga diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh belanja dan pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan dengan permasalahan dalam tulisan ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap angka kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap angka kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap angka kemiskinan?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap angka kemiskinan?
5. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap angka kemiskinan?
6. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan regional nasional terhadap kemiskinan.

C. Tujuan Analisis

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan utama analisis ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap angka kemiskinan.
2. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap angka kemiskinan.
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap angka kemiskinan.
4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap angka kemiskinan.
5. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap angka kemiskinan.
6. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan regional nasional terhadap kemiskinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belanja negara

Belanja negara merupakan penjumlahan dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, alokasi transfer ke daerah, dan dana desa. Secara ringkas, masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut ³:

1. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari:

- a. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi, dalam bentuk uang atau barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
- c. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- d. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah atau pun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
- e. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat (UU tentang APBN).
- f. Belanja Hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterusahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah.

- g. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga (Pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya "*risiko sosial*", meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.
- h. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat *ad hoc* (tidak terus menerus), kewajiban Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.

2. Transfer ke daerah

Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Transfer ke daerah terdiri dari:

- a. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil (DBH), (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang lingkup Otsus terdiri dari (1)

Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (2) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (3) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

- c. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. Ruang lingkup dana penyesuaian adalah (a) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (b) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD; (c) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (d) Dana insentif daerah (DID); (e) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Mulai APBN tahun 2016 nomenklatur dana penyesuaian diubah menjadi DAK Non Fisik.
- d. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan idiosafis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiosafis sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

C. Kemiskinan Merupakan Masalah dalam Pembangunan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang umumnya mempunyai potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1996:234). Kemiskinan berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membentengi seseorang sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil (BPS, 2009:5). Secara konseptual kemiskinan juga dibedakan menjadi 2 macam. Pertama kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kedua adalah kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan karena ketidakmampuannya untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (BPS, 2009:6-7).

Banyak orang Indonesia mengalami ketidaktahanan pangan, hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, artinya seseorang itu tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengkonsumsi 2.100 kilo kalori per hari dan juga untuk membeli barang- barang penting non makanan seperti pakaian dan rumah. Menurut Menteri Dalam Negeri, dua pertiga penduduk mengkonsumsi kurang dari 2.100 kilo kalori per hari. Di Indonesia, ketidaktahanan pangan bukan disebabkan oleh kurangnya persediaan beras, tetapi kemampuan untuk membeli beras, dimana kebutuhan beras masih bisa dicukupi dan sisanya diimpor (Kuncoro, 2006:407). Menurut SMERU (Social Monitoring and Early Response Unit Research Institut No.3: May-June/2001) kemiskinan adalah status seseorang yang menjadi ukuran penting dalam kesejahteraan rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan konsumsi untuk mengukur dasar kemiskinan. Sebuah rumah tangga dianggap "miskin" jika tingkat konsumsinya perkapita berada di bawah garis kemiskinan (Lukman, 2004).

III. METODOLOGI ANALISIS

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi yaitu: $\ln Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_n$. Dengan Y adalah varibel dependen, (X_1, X_2, \dots, X_n) adalah variabel independen, α adalah konstanta (faktor yang mempengaruhi selain variabel independen), dan $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ adalah koefisien variabel independen. Dalam penelitian ini, model regresi dibagi menjadi dua model yaitu :

- a. Angka kemiskinan nasional (dalam persen) adalah dependen variabel dinamakan AK sebagai Y_1 , belanja pemerintah pusat (dalam triliun rupiah) adalah independent variabel dinamakan BPP sebagai X_1 , dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah independen variabel dinamakan PEN sebagai X_2 .
- b. Angka kemiskinan regional (dalam persen) adalah dependen variabel dinamakan AKR sebagai Y_2 , Belanja pemerintah daerah (dalam miliar rupiah) adalah independent variabel dinamakan BPD sebagai X_1 , dan Pertumbuhan ekonomi regional adalah independen variabel dinamakan PER sebagai X_2 .

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data *time series* dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2015 dan data panel seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2015 (catatan hanya provinsi Kalimantan Utara yang tidak diambil karena provinsi baru pemekaran pada tahun 2013).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Data

Hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini menjadi dua yaitu belanja pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap angka kemiskinan dan belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi regional terhadap angka kemiskinan.

1. Belanja Pemerintah Pusat Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terhadap Angka Kemiskinan.

Hasil analisis data untuk pengaruh belanja pemerintah pusat (BPP) dan pertumbuhan ekonomi nasional (PEN) terhadap angka kemiskinan (AK) diperoleh model yaitu:

$$\ln AK = 3,040088 - 0,000280 BPP - 0,020033 (PEN) \quad \text{Model 1}$$

dengan nilai *probability* BPP sebesar 0,0000, PEN sebesar 0,0,0020 dan konstanta sebesar 0,0000 dan Nilai *R-squared* sebesar 0,7934 atau 79,34 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa jika belanja pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kenaikan, maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya jika belanja pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan, maka angka kemiskinan akan mengalami kenaikan.

2. Belanja Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Terhadap Angka Kemiskinan.

Hasil analisis data untuk pengaruh belanja pemerintah daerah (BPD) dan pertumbuhan ekonomi regional (PER) terhadap angka kemiskinan (AK) diperoleh model yaitu :

$$\ln AKR = 2,483108 - 0,040184(\ln PER) - 0,00000321(BPD) \quad \text{Model 2}$$

dengan nilai *probability* $\ln PER$ sebesar 0,0000, BPD sebesar 0,0046 dan konstanta sebesar 0,0000 dan Nilai *R-squared* sebesar 0,9904 atau 99,04 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa jika belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi regional mengalami kenaikan, maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya jika belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi regional mengalami penurunan, maka angka kemiskinan akan mengalami kenaikan.

B. Pembahasan

Belanja Pemerintah Pusat setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut belum bisa menjamin penurunan terhadap angka kemiskinan secara proporsional dengan kenaikan anggarannya. Dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2000 belanja pemerintah pusat terus meningkat, sedangkan angka kemiskinan masih berfluktuatif tapi cenderung menurun. Belanja ini dimungkinkan masih banyak belanja yang belum pro kemiskinan sehingga angka kemiskinan berfluktuatif. Selain itu, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis dan terdapat kegaduhan politik yang cukup memberatkan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 bukan mengalami kenaikan, tapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup besar menjadi -13,1 persen. Akibat dari kondisi ini program-program pemerintah yang pro kemiskinan menjadi tidak fokus dan mau tidak mau Indonesia fokus untuk membangun kembali perekonomian nasional menjadi kondusif. Angka kemiskinan tahun 1998 merupakan angka yang terbesar dalam

periode 1984-2000 yaitu sebesar 24,2 persen, tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan walaupun masih relatif kecil.

Dari tahun 2001 sampai tahun 2010 belanja pemerintah pusat terus mengalami kenaikan dan angka kemiskinan terus mengalami penurunan kecuali tahun 2006 angka kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kondisi angka kemiskinan yang terjadi pada tahun 2006 disebabkan oleh kenaikan dari bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM ini mengakibatkan beberapa barang yang berhubungan dengan BBM akan mengalami kenaikan khususnya barang pangan pokok seperti beras. Padahal di tahun 2006 Pemerintah sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi tahun tersebut masih menjadi tahun yang cukup berat bagi perekonomian karena daya beli masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan pemberian BLT sifatnya sementara dan tidak mampu meningkatkan derajat dan kesejahteraan penduduk miskin. Akibatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 menjadi bertambah. Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 masih mengalami pertumbuhan sebesar 5,5 persen sedikit lebih kecil dari tahun sebelumnya. Periode ini merupakan kondisi yang ideal dan sesuai dengan model 1 dan model 2. Belanja pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode ini sangat signifikan mengurangi angka kemiskinan. Banyak program-program pengentasan kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah dalam periode ini.

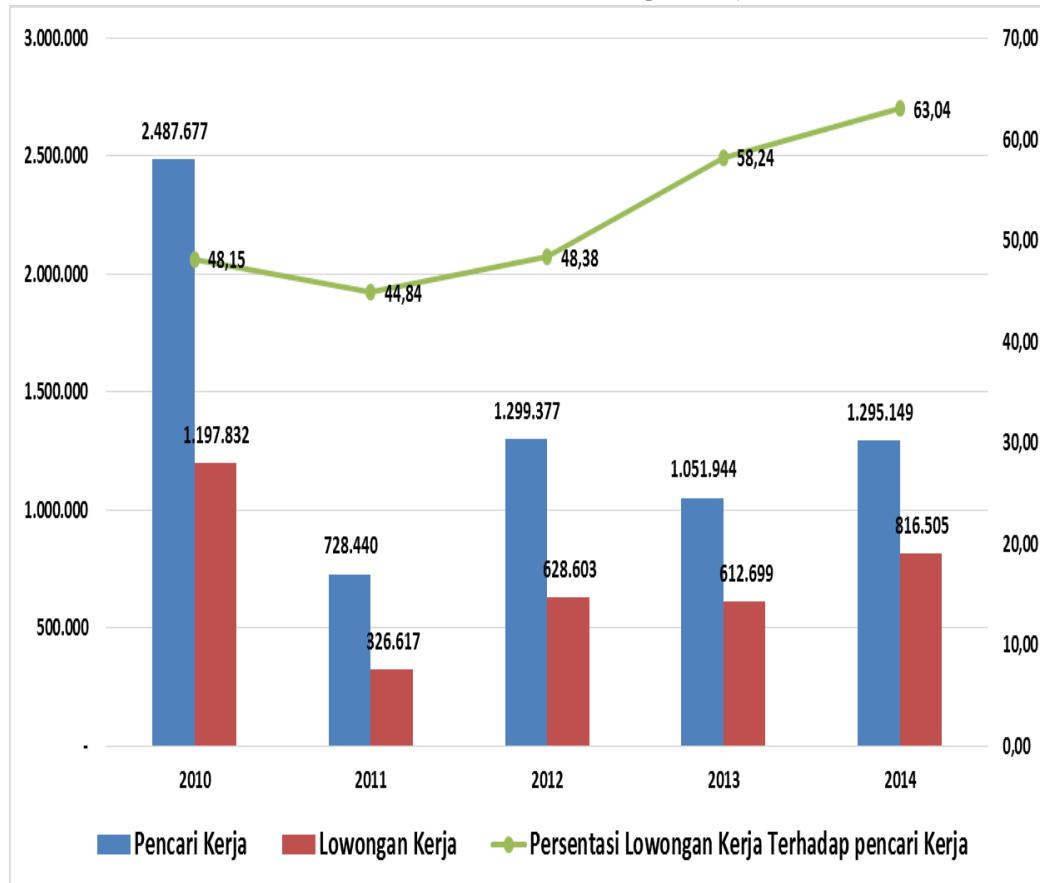
Periode tahun 2011 sampai dengan 2016 belanja pemerintah pusat terus mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang cenderung fluktuatif, sedangkan angka kemiskinan terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015 angka kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena kenaikan harga pangan. Program ini pada dasarnya baik buat jangka panjang, namun dalam jangka pendek terlihat kurang baik karena salah satunya dilihat dari angka kemiskinan mengalami kenaikan. Untuk bisa melihat dampak dari program infrastruktur, baru dapat dilihat pada tahun-tahun yang akan datang.

Selain belanja pemerintah pusat, untuk mengurangi angka kemiskinan diperlukannya upaya dari pemerintah daerah. Dalam APBN jelas bahwa pemerintah pusat memberikan dana ke pemerintah daerah atau dikenal dengan dana transfer daerah yang salah satunya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja pemerintah daerah setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, sedangkan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuatif. Kondisi perekonomian regional ini juga cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Dari hasil analisis data model 2, diperoleh kontribusi pertumbuhan

ekonomi regional lebih besar dari kontribusi belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi regional signifikan mempengaruhi angka kemiskinan dengan hubungan negatif.

Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi ini merupakan konsekuensi logis, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi cenderung bisa menyerap tenaga kerja, karena salah satu faktor kemiskinan adalah pengangguran dan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan ini belum tentu diimbangi dengan jumlah lapangan kerja. Penurunan lapangan kerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor berkurangnya permintaan suatu produk dan *transformasi* tenaga manusia dengan tenaga mesin sering kali memberikan dampak negatif terhadap lapangan kerja. Selain itu, jumlah pencari kerja dan lapangan kerja belum bisa seimbang. Dari grafik 1 jumlah pencari kerja setiap tahunnya lebih dari lowongan kerja yang ada. Sisa pencari kerja yang belum mendapatkan kerja akan berpotensi menjadi pengangguran.

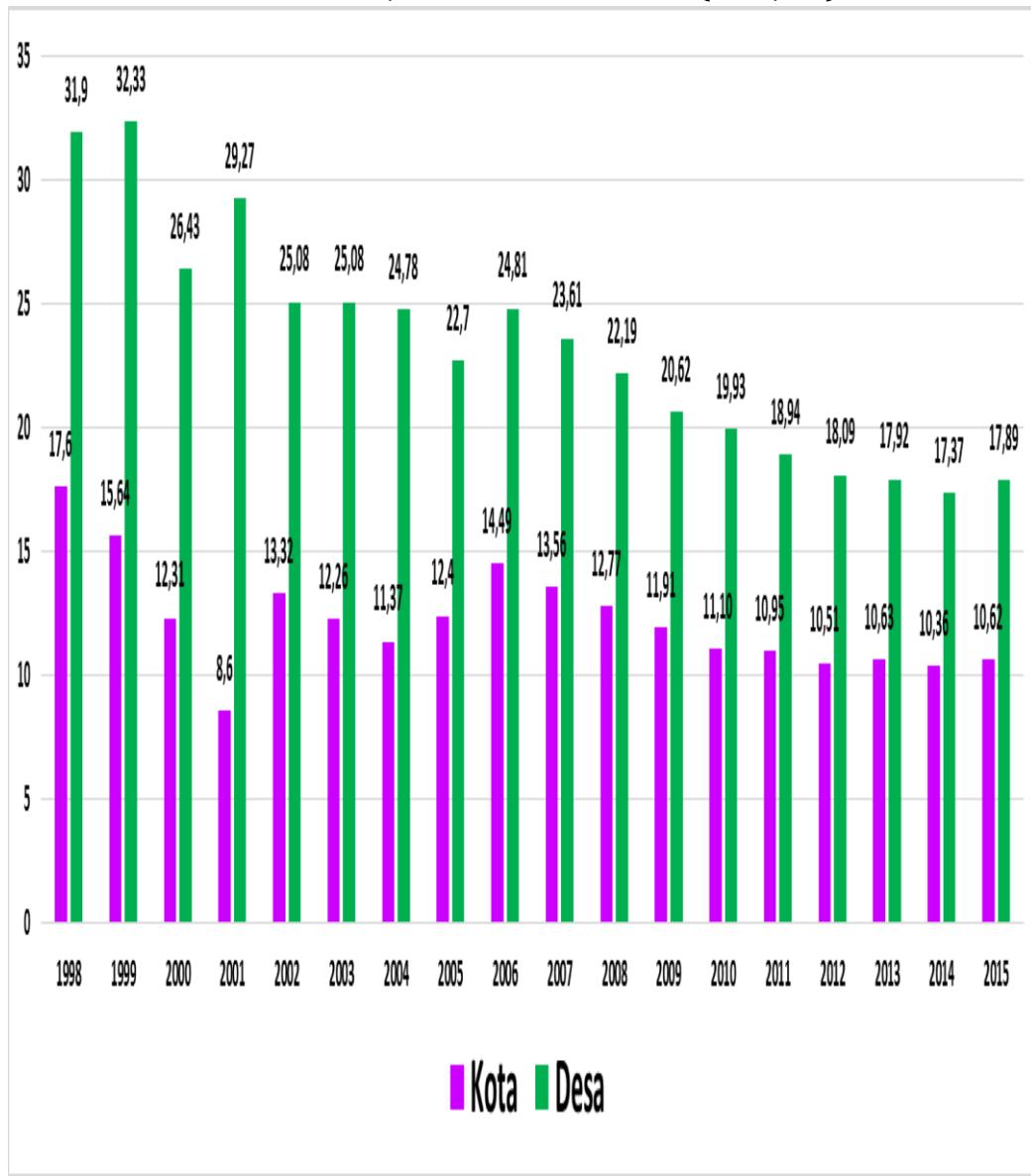
Grafik 1. Pencari dan Lowongan Kerja



Sumber : BPS, diolah

Hasil analisis data diperoleh $\ln AK = 0,74 \ln AP$, dengan AK adalah angka kemiskinan dan AP adalah angka pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran mempengaruhi angka kemiskinan dengan hubungan yang positif. Jika pengangguran semakin meningkat, maka kemiskinan juga akan meningkat dan sebaliknya. Jadi upaya pemerintah untuk bisa mengentaskan kemiskinan salah satunya adalah terus berupaya menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang dimaksud bukan hanya fokus pada industri di kota, namun Pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja di perdesaan, karena kemiskinan cenderung lebih besar di desa.

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS, diolah

Salah satu agenda pembangunan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo yang telah dirumuskan dalam nawacita yaitu membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Adapun tema RKP tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Jika program ini diimplementasikan dengan optimal, maka kemiskinan yang melanda Indonesia bisa diminimalisir dengan baik. Desa merupakan lokomotif pembangunan nasional, karena adanya suatu negara tidak lepas dari adanya desa. Pemerintah melakukan pembangunan-pembangunan ekonomi cenderung berada di kota. Sedangkan pembangunan ekonomi di perdesaan masih minim. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung untuk urbanisasi ke kota sebagai upaya mencari kerja. Padahal masyarakat yang ke kota dengan tidak dibekali pendidikan cenderung mengalami kesulitan mencari kerja yang menimbulkan potensi pengangguran di kota dan menimbulkan potensi kemiskinan. Namun, walaupun banyak masyarakat yang urbanisasi ke kota, jumlah kemiskinan masih lebih besar di desa. Artinya perekonomian di desa masih rendah.

Sedangkan belanja ada yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan angka kemiskinan. Belanja yang berhubungan langsung dengan angka kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Beasiswa untuk Keluarga Miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan subisidi pupuk. Belanja ini bisa langsung dinikmati oleh penduduk miskin. Semua program tersebut masih belum bisa optimal untuk menurunkan angka kemiskinan, karena program tersebut belum tepat untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Sedangkan belanja pemerintah yang tidak langsung adalah belanja modal seperti belanja infrastruktur. Belanja ini jelas tidak bisa langsung dinikmati dalam jangka waktu pendek, tapi program ini bisa dinikmati dalam jangka panjang dan periode menikmati yang panjang. Seperti contoh, perbaikan jalan. Perbaikan ini bisa membantu perekonomian karena dengan jalan yang baik maka distribusi barang yang bernilai ekonomis dan non ekonomis bisa lebih cepat. Artinya biaya distribusi bisa lebih rendah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesejahteraan suatu negara bisa tercermin dari angka kemiskinannya, sehingga pengentasan kemiskinan merupakan tantangan pembangunan bagi setiap presiden terpilih

sebagai kepala pemerintahan. Kemiskinan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud merupakan faktor kondisi perekonomian nasional, sedangkan faktor eksternal yang dimaksud merupakan faktor perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional. Belanja pemerintah merupakan roda penggerak bagi perekonomian nasional. Belanja ini ada yang berhubungan langsung dan ada yang tidak berhubungan langsung dengan angka kemiskinan. Belanja yang tidak berhubungan langsung bisa tercermin dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa menyerap tenaga kerja. Angka kemiskinan ini cenderung lebih besar di desa karena selama ini pembangunan perekonomian cenderung terpusat diperkotaan. Kemudian dari hasil analisisi data diperoleh bahwa belanja pemerintah pusat maupun daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional signifikan mempengaruhi angka kemiskinan dengan hubungan yang negatif. Artinya, jika belanja pemerintah pusat maupun daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional meningkat, maka angka kemiskinan akan menurun.

B. Rekomendasi

Upaya pemerintah melalui belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Beasiswa untuk Keluarga Miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan subisidi pupuk memang bisa langsung dinikmati oleh penduduk miskin. Namun semua program tersebut masih belum bisa optimal untuk menurunkan angka kemiskinan, karena program tersebut belum tepat untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja dan bersifat jangka pendek. Oleh karena itu pemerintah perlu mencari kebijakan yang komprehensif dan sifatnya jangka panjang agar dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini terkendala keterbatasan data dan waktu, untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya data belanja yang digunakan adalah data anggaran kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2009. BPS. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Keempat. UPP STIM YKPN. Jakarta.
- Lukman, Lusiana. 2004. The Impact of Goverment Expenditure on Poverty Reduction in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.3, No. 1, April 2004 51-57, FE Unsyiah.
- J. Baumol, W and Alan S. Bhinder. 2003. Economics Principles and Policy ninth edition. United Stated Of America.
- Hartoyo, Nafsi dan Subekan, Achmat. 2012. Keuangan daerah: Terapi Atasi Kemiskinan. Malang : Alta Pustaka.
- Hasan, T. Iskandar Ben dan Zikriah. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Bruto terhadap Penduduk Miskin Aceh. Jurnal Universitas Syiah Kuala
- Gujurati. 2004. *Basic Econometrics*. The McGraw–Hill Companies
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia, Edisi II